

Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa Lompad

Abzan Laebe¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
Email: 120606033@unima.ac.id, romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 20, 2025

Accepted Oktober 15, 2025

Published November 30, 2025

Keywords:

Demokrasi,
Kehidupan,
Masyarakat Desa



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik demokrasi dalam kehidupan masyarakat Desa Lompad secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek prosedural dan formal, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai demokrasi dipahami, diinternalisasi, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka sehari-hari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik-praktik demokrasi dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat, termasuk forum musyawarah desa, pertemuan tingkat RT/RW, dan kegiatan keagamaan. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber kunci yang dipilih secara purposif, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan makna yang muncul terkait praktik demokrasi. Penelitian menemukan bahwa masyarakat Desa Lompad memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi dengan partisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan desa, termasuk keterlibatan generasi muda sebagai aparat desa. Nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, tanggung jawab, dan kerja sama telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme penyelesaian masalah melalui musyawarah dengan prinsip kesetaraan menunjukkan praktik demokrasi deliberatif yang matang, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama melalui dialog dan pertimbangan rasional.

Abstract

This study aims to comprehensively explore democratic practices in the lives of the Lompad Village community, not only limited to procedural and formal aspects, but also analyze how democratic values are understood, internalized, and practiced by the community in various dimensions of their daily social, economic, and cultural lives. The study uses a qualitative approach with observation and in-depth interview methods. Observations were conducted to directly observe democratic practices in various community social activities, including village deliberation forums, RT/RW level meetings, and religious activities. In-depth interviews were conducted with purposively selected key informants, including community leaders, village officials, and residents active in social activities. Data were analyzed thematically to identify emerging patterns and meanings related to democratic practices. The study found that the Lompad Village community has a high level of political awareness with active participation in political activities and village government, including the involvement of the younger generation as village officials. Democratic values such as tolerance, respect for differences of opinion, responsibility, and cooperation have been internalized in the community's social life. The mechanism for resolving problems through deliberation with the principle of equality demonstrates the practice of mature deliberative democracy, where decisions are taken based on mutual agreement through dialogue and rational consideration.

Keywords: *Democracy, Life, Village Society*

A. Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi 1998, dengan implementasi sistem demokrasi yang berbasis Pancasila sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat nasional hingga desa (Aziz, 2016). Desa sebagai basis terkecil dari struktur pemerintahan Indonesia memiliki peran strategis sebagai embrio pembentukan masyarakat politik dan pemerintahan yang demokratis, di mana nilai-nilai demokrasi konstitusional terkandung dalam setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa (Suharyanto, 2021). Implementasi demokrasi di tingkat desa tidak hanya bersifat prosedural dalam bentuk pemilihan kepala desa, tetapi juga substantif melalui mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis melalui forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur-unsur masyarakat (Aminurosyah, 2018). Konteks demokrasi lokal di tingkat desa menjadi sangat penting karena memberikan kesempatan langsung bagi masyarakat untuk terlibat dan memengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka (Christensen dalam Sarundajang, 2014).

Otonomi desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip demokrasi dan partisipasi (Aziz, 2016). Dalam konteks otonomi desa, musyawarah desa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi partisipatif, di mana masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek yang aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program pembangunan desa (Wahyuni et al., 2018). Desentralisasi kewenangan hingga tingkat desa ini dipandang sebagai upaya konkret dalam memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput (*grassroot democracy*) dan mencegah potensi disintegrasi bangsa melalui pemberian ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat lokal (Sarundajang, 2014). Dinamika demokrasi desa di era otonomi daerah menunjukkan transformasi signifikan dalam pola relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, di mana pengambilan keputusan semakin melibatkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa secara langsung (Suharyanto, 2021).

Meskipun kerangka normatif tentang demokrasi desa telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, kualitas partisipasi masyarakat, dan dinamika sosial-politik lokal yang beragam (Aziz, 2016). Praktik demokrasi di desa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat setempat, termasuk sistem nilai, struktur sosial, pola kepemimpinan tradisional, dan tingkat literasi politik masyarakat yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya (Aminurosyah, 2018). Heterogenitas tipologi desa, mulai dari desa tradisional, transisional, hingga modern, turut memengaruhi bagaimana proses demokrasi berlangsung dan bagaimana masyarakat desa memahami serta mempraktikkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari mereka (Suharyanto et al., 2015). Pemahaman mendalam tentang praktik demokrasi dalam konteks spesifik kehidupan masyarakat desa menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat desa, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat demokrasi lokal yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik demokrasi di tingkat desa dari berbagai perspektif dan konteks. Penelitian Suharyanto (2021) tentang dinamika lembaga demokrasi desa di Indonesia mengidentifikasi bahwa meskipun nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional terkandung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masih terdapat

interpretasi dan pandangan yang berbeda mengenai karakteristik demokrasi desa yang ideal, terutama berkaitan dengan bagaimana menyeimbangkan antara nilai demokrasi modern dengan nilai-nilai lokal yang telah berakar dalam masyarakat desa. Sementara itu, Aziz (2016) dalam kajiannya tentang otonomi desa dan efektivitas dana desa menemukan bahwa otonomi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa, menjadi ujian nyata bagi kapasitas demokrasi desa dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif yang menghambat partisipasi masyarakat secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya finansial, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Wahyuni et al. (2018) dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Maguwoharjo mengungkapkan bahwa meskipun UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dalam praktiknya partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat simbolis dan belum mencerminkan partisipasi substantif yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembangunan desa. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kesadaran politik, akses informasi, dan struktur sosial masyarakat sangat memengaruhi kualitas partisipasi dalam forum musyawarah desa. Sementara itu, Aminurosyah (2018) dalam studi kasusnya tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa proses demokrasi di desa masih diwarnai oleh praktik-praktik politik pragmatis seperti politik uang, mobilisasi berbasis patronase, dan konflik antarkelompok masyarakat, yang mengindikasikan bahwa konsolidasi demokrasi di tingkat desa masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pemilihan yang bebas, jujur, dan adil.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji praktik demokrasi di tingkat desa, masih terdapat kesenjangan pengetahuan (research gap) yang signifikan terutama dalam memahami dinamika demokrasi dalam konteks sosial-budaya spesifik pada desa-desa dengan karakteristik lokal yang unik. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek prosedural demokrasi seperti pemilihan kepala desa dan mekanisme formal musyawarah desa, namun kurang mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai demokrasi diterjemahkan, dipahami, dan dipraktikkan oleh masyarakat desa dalam konteks kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh sistem nilai lokal, struktur sosial tradisional, dan dinamika perubahan sosial yang terjadi di desa. Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum banyak menganalisis secara mendalam bagaimana interaksi antara lembaga formal demokrasi desa (seperti pemerintah desa dan BPD) dengan lembaga informal (seperti tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok-kelompok masyarakat) membentuk pola-pola demokrasi yang khas di tingkat lokal, yang mungkin berbeda dengan model demokrasi prosedural yang diatur dalam kerangka normatif.

Selain itu, sebagian besar kajian terdahulu dilakukan pada desa-desa di Jawa atau daerah perkotaan yang memiliki aksesibilitas tinggi dan infrastruktur yang relatif memadai, sehingga pemahaman tentang praktik demokrasi di desa-desa yang memiliki karakteristik geografis, sosial-ekonomi, dan budaya yang berbeda masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian tersebut juga belum banyak mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor kontekstual seperti tingkat pendidikan masyarakat, struktur mata pencaharian, pola pemukiman, dan akses terhadap informasi dan teknologi memengaruhi proses dan kualitas demokrasi di tingkat desa. Lebih jauh lagi, masih sedikit penelitian yang menganalisis bagaimana masyarakat desa sendiri memaknai dan mengalami demokrasi dalam kehidupan mereka sehari-hari, di luar konteks formal pemilihan dan musyawarah desa, sehingga pemahaman tentang demokrasi desa masih cenderung normatif dan kurang menangkap realitas empiris yang kompleks dan beragam.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengeksplorasi praktik demokrasi dalam kehidupan masyarakat Desa Lompad secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek prosedural dan formal, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai demokrasi dipahami, diinternalisasi, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka sehari-hari. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan etnografis yang mendalam untuk memahami makna demokrasi dari perspektif masyarakat desa sendiri (emic perspective), sehingga dapat mengungkap bagaimana konsep demokrasi yang sering diasumsikan universal diterjemahkan dan diadaptasi dalam konteks lokal yang spesifik dengan mempertimbangkan sistem nilai, norma sosial, dan struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada upayanya untuk menganalisis interaksi dinamis antara lembaga formal demokrasi desa dengan struktur dan praktik sosial informal yang telah berakar dalam masyarakat, sehingga dapat mengidentifikasi pola-pola hibrid demokrasi yang muncul sebagai hasil negosiasi antara modernitas dan tradisi.

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperkaya pemahaman tentang demokrasi lokal (local democracy) dengan menghadirkan perspektif dari akar rumput yang mempertimbangkan kompleksitas sosial-budaya masyarakat desa, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur tentang demokrasi di Indonesia yang cenderung didominasi oleh kajian-kajian pada level nasional atau daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan relevan untuk penguatan kapasitas demokrasi di tingkat desa, dengan mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan spesifik masyarakat lokal, sehingga program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan desa dapat dirancang dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi metodologis dengan mengembangkan kerangka analisis untuk memahami praktik demokrasi dalam konteks masyarakat desa yang dapat diterapkan pada penelitian-penelitian serupa di desa-desa lain dengan karakteristik yang berbeda, sehingga memperkaya khazanah metodologi penelitian tentang demokrasi lokal di Indonesia.

Realitas demokrasi dalam kehidupan masyarakat Desa Lompad mencerminkan dinamika yang kompleks antara harapan normatif yang diatur dalam kerangka hukum tentang desa dengan praktik nyata yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Pengamatan awal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam forum-forum formal seperti musyawarah desa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi, keterbatasan akses informasi tentang program-program pemerintah desa, hingga adanya kesenjangan partisipasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda berdasarkan status sosial-ekonomi, pendidikan, gender, dan usia. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan di desa tidak hanya terjadi dalam forum formal, tetapi juga melalui berbagai mekanisme informal seperti pertemuan-pertemuan di tingkat RT/RW, pengajian, arisan, dan forum-forum sosial lainnya yang lebih akrab bagi masyarakat, di mana aspirasi dan kepentingan masyarakat dikomunikasikan dan dinegosiasikan sebelum dibawa ke forum formal.

Selain itu, realitas demokrasi di Desa Lompad juga tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan struktur mata pencaharian, mobilitas penduduk, masuknya nilai-nilai modern melalui pendidikan dan media, serta interaksi dengan dunia luar yang semakin intensif. Perubahan-perubahan ini membawa implikasi terhadap pola partisipasi masyarakat, orientasi nilai dalam pengambilan keputusan, dan hubungan antara pemimpin desa dengan masyarakat. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang semakin kritis dan menuntut transparansi serta akuntabilitas pemerintah desa, namun di sisi lain masih ada kelompok masyarakat yang mempertahankan pola hubungan patronase tradisional dan cenderung pasif dalam menggunakan hak politiknya. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat desa bukanlah proses yang linear dan seragam,

tetapi merupakan arena kontestasi berbagai kepentingan, nilai, dan identitas yang perlu dipahami secara komprehensif untuk dapat mengembangkan strategi penguatan demokrasi yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam untuk memahami praktik demokrasi dalam kehidupan masyarakat Desa Lompad. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi makna dan pengalaman subjektif masyarakat dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari (Creswell, 2014). Metode observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik-praktik demokrasi dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat, termasuk forum musyawarah desa, pertemuan tingkat RT/RW, kegiatan keagamaan, dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, toleransi, dan musyawarah dipraktikkan dalam konteks nyata, tidak hanya dalam forum formal tetapi juga dalam ruang-ruang informal yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa (Sugiyono, 2017). Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa narasumber kunci yang dipilih secara purposif, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, untuk menggali pemahaman mendalam tentang perspektif mereka terhadap demokrasi di desa serta pengalaman mereka dalam mempraktikkan nilai-nilai demokratis. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema utama, dan makna-makna yang muncul terkait dengan praktik demokrasi dalam kehidupan masyarakat Desa Lompad (Miles et al., 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi Politik dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Wawancara dengan Ibu CR mengungkapkan,

”...pentingnya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal kebebasan mengemukakan pendapat dan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintahan”.

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu CR



Sumber: Data Primer

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lompad memiliki tingkat kesadaran politik yang relatif tinggi, yang tercermin dari partisipasi aktif sebagian besar warga dalam berbagai kegiatan politik dan pemerintahan desa. Pengamatan di lapangan mengungkapkan bahwa demokrasi dalam kehidupan masyarakat Desa Lompad telah menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama, sejalan dengan prinsip dasar demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Budiardjo, 2008).

Fenomena yang menarik adalah banyaknya warga masyarakat, termasuk generasi muda, yang terlibat aktif dalam dunia politik baik di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih luas, yang mengindikasikan adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya partisipasi politik dalam memengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Keterlibatan pemuda sebagai aparat desa juga menunjukkan regenerasi kepemimpinan yang sehat dan membawa perspektif baru dalam pengelolaan pemerintahan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda.

Partisipasi politik masyarakat Desa Lompad tidak hanya terbatas pada aktivitas formal seperti pemilihan kepala desa atau pemilihan umum, tetapi juga meluas pada keterlibatan dalam berbagai forum pengambilan keputusan di tingkat desa. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam menghadiri pertemuan-pertemuan desa, baik yang bersifat formal seperti musyawarah desa maupun yang bersifat informal seperti pertemuan di tingkat lingkungan atau dusun. Dinamika partisipasi ini mencerminkan kesadaran masyarakat bahwa suara mereka memiliki pengaruh dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan desa, sesuai dengan konsep demokrasi partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif warga dalam proses politik (Pateman, 1970).

Fenomena banyaknya warga yang terjun ke dunia politik juga mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Lompad memandang politik bukan sebagai sesuatu yang negatif atau kotor, melainkan sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan bersama, yang menunjukkan kematangan politik masyarakat dalam memahami esensi demokrasi.

Keterlibatan generasi muda sebagai aparat desa merupakan salah satu indikator penting dari demokratisasi di tingkat lokal, karena membuka ruang partisipasi bagi segmen masyarakat yang selama ini sering terpinggirkan dalam struktur kekuasaan tradisional yang cenderung didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua. Kehadiran pemuda dalam struktur pemerintahan desa membawa dinamika baru dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabilitas, inovasi dalam pelayanan publik, dan pendekatan yang lebih inklusif dalam melibatkan berbagai kelompok masyarakat (Nadzir, 2013).

Observasi ini menunjukkan bahwa Desa Lompad telah mengalami transformasi dalam pola kepemimpinan dan partisipasi politik, di mana regenerasi kepemimpinan berlangsung secara natural melalui keterlibatan aktif generasi muda dalam berbagai aktivitas politik dan pemerintahan, yang pada gilirannya memperkuat fondasi demokrasi lokal yang berkelanjutan.

2. Nilai-Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Wawancara dengan Bapak AW mengungkapkan bahwa,

”... demokrasi di Desa Lompad tidak hanya dipahami sebagai sistem politik formal, tetapi telah terinternalisasi dalam nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Masyarakat

Desa Lompad memiliki nilai-nilai fundamental yang mendukung praktik demokrasi, yaitu toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, tanggung jawab, dan kerja sama”.

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak AW



Sumber: Data Primer

Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap pluralisme, kebebasan berpendapat, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bersama (Dahl, 2001).

Toleransi sebagai salah satu nilai utama yang dimiliki masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman yang ada, termasuk keberagaman agama, di mana mayoritas masyarakat beragama Kristen namun tetap menghormati dan hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, khususnya Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Lompad tidak hanya berfungsi sebagai prosedur politik, tetapi telah menjadi budaya yang membentuk pola interaksi sosial masyarakat.

Penghormatan terhadap perbedaan pendapat merupakan indikator penting dari kematangan demokrasi dalam masyarakat, karena mencerminkan kemampuan untuk menerima pluralitas pandangan dan tidak memaksakan kehendak satu kelompok atas kelompok lainnya. Dalam konteks Desa Lompad, nilai ini termanifestasi dalam berbagai forum pengambilan keputusan, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya tanpa takut akan diskriminasi atau marginalisasi. Nilai tanggung jawab yang dimiliki masyarakat juga menjadi modal sosial yang penting dalam menjalankan demokrasi, karena demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang tidak hanya menuntut hak tetapi juga menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat (Almond & Verba, 1963).

Sementara itu, nilai kerja sama mencerminkan pemahaman kolektif bahwa pembangunan desa dan kesejahteraan bersama hanya dapat dicapai melalui upaya bersama yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, bukan melalui kompetisi atau konflik yang merusak kohesi sosial.

Toleransi beragama yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Lompad merupakan manifestasi konkret dari nilai demokrasi dalam kehidupan multikultural. Meskipun mayoritas penduduk beragama Kristen, mereka tetap menghormati dan memberikan ruang bagi pemeluk agama lain untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa intimidasi atau diskriminasi. Praktik toleransi ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang pluralis, di mana keberagaman sering kali menjadi sumber potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik (Effendy, 2011).

Dalam Desa Lompad, toleransi tidak hanya dipahami sebagai sikap pasif untuk tidak mengganggu kelompok lain, tetapi juga sebagai sikap aktif untuk menghormati, memahami, dan bahkan mendukung keberagaman yang ada. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Lompad telah melampaui dimensi prosedural dan mencapai dimensi substansial, di mana nilai-nilai demokratis telah menjadi bagian integral dari identitas dan budaya masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi penguatan demokrasi yang berkelanjutan.

3. Mekanisme Penyelesaian Masalah dan Pengambilan Keputusan Demokratis

Wawancara dengan Ibu ST mengungkapkan bahwa,

”...penerapan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Desa Lompad dapat dilihat dari mekanisme penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Aspek pertama yang diidentifikasi adalah komitmen bersama untuk menjaga kedamaian masyarakat dengan tidak membedakan warga berdasarkan status harta, tahta, atau jabatan”.

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu ST



Sumber: Data Primer

Prinsip kesetaraan ini merupakan salah satu fondasi demokrasi yang mengakui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dalam proses politik, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial-ekonomi (Rawls, 1971).

Dalam praktiknya, prinsip ini menciptakan lingkungan sosial yang inklusif di mana setiap warga, terlepas dari latar belakang ekonomi atau posisi sosialnya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan dan mempengaruhi keputusan yang dibuat. Praktik ini sangat penting dalam mencegah oligarki lokal di mana segelintir elit ekonomi atau politik mendominasi pengambilan keputusan dan mengabaikan kepentingan mayoritas masyarakat.

Aspek kedua yang sangat penting adalah pendekatan dalam mengatasi masalah dengan pemikiran jernih melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat luas. Musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan memiliki akar yang kuat dalam budaya Indonesia dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang menekankan pentingnya mencapai mufakat melalui dialog dan pertimbangan bersama (Latif, 2011).

Dalam konteks Desa Lompad, ketika muncul permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan desa, masyarakat tidak menyelesaikannya secara sepihak atau melalui keputusan otoritatif dari elite desa, melainkan melalui forum musyawarah yang memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan perspektif dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan yang diambil karena didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan paksaan atau dominasi satu pihak atas pihak lain (Habermas, 1984).

Praktik menghadapi masalah dengan pemikiran jernih dan melalui musyawarah mencerminkan kematangan demokrasi deliberatif dalam masyarakat, di mana keputusan tidak diambil berdasarkan emosi sesaat atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan melalui proses pertimbangan rasional yang melibatkan argumentasi dan dialog antar warga. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi masyarakat, di mana warga belajar untuk mendengarkan perspektif yang berbeda, mengelola konflik secara konstruktif, dan mencapai kompromi yang mengakomodasi berbagai kepentingan (Gutmann & Thompson, 2004).

Dalam jangka panjang, praktik musyawarah yang konsisten akan memperkuat modal sosial masyarakat, meningkatkan kepercayaan antar warga, dan membangun budaya politik yang lebih demokratis. Pengalaman Desa Lompad menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada struktur formal dan aturan prosedural, tetapi juga pada kualitas proses deliberasi dan komitmen masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog daripada konfrontasi atau kekerasan.

D. Kesimpulan

Praktik demokrasi dalam kehidupan masyarakat Desa Lompad menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana nilai-nilai demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal dalam pemilihan kepala desa atau forum musyawarah, tetapi telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Tingkat kesadaran politik yang tinggi tercermin dari partisipasi aktif warga dalam berbagai kegiatan politik dan pemerintahan desa, termasuk keterlibatan generasi muda sebagai aparat desa yang membawa dinamika baru dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif. Nilai-nilai fundamental seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, tanggung jawab, dan kerja sama telah menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat, khususnya dalam konteks toleransi beragama yang dipraktikkan secara nyata antara mayoritas Kristen dengan pemeluk agama lain.

Mekanisme penyelesaian masalah melalui musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dengan prinsip kesetaraan tanpa membedakan status sosial-ekonomi, menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Lompad telah melampaui dimensi prosedural dan mencapai dimensi substansial. Pendekatan demokratis deliberatif dalam pengambilan keputusan melalui dialog dan pertimbangan bersama tidak hanya efektif dalam menyelesaikan permasalahan, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan dan modal sosial masyarakat. Praktik demokrasi yang khas di Desa Lompad ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal dapat berkembang dengan baik ketika didukung oleh budaya masyarakat yang menghargai partisipasi, toleransi, dan musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan, yang pada akhirnya menciptakan fondasi yang kuat bagi konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Aminurosyah, A. (2018). Pemilihan kepala desa dan dinamika politik lokal di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(1), 193-211.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia.
- Effendy, B. (2011). *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Galang Press.
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). *Why Deliberative Democracy?* Princeton University Press.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Nadzir, M. (2013). Membangun pemberdayaan kewargaan generasi muda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 123-135.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sarundajang, S. H. (2014). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka memperkuat demokrasi lokal. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyanto, A. (2021). Dinamika lembaga demokrasi desa di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 45-62.
- Suharyanto, A., et al. (2015). Tipologi desa dan implikasinya terhadap pola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Wahyuni, S., et al. (2018). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Maguwoharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 67-84.